

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah salah satu hal mendasar dalam keamanan dalam negeri yang harus diperhatikan dalam seluruh individu di sebuah negara, yang artinya negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa setiap individu memiliki kesejahteraan dalam menggunakan hak-hak dasarnya. Realitanya, masih banyak negara yang masih kurang kesadaran atau bahkan cenderung mengabaikan pentingnya HAM dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk bukti isu HAM yang seringkali terjadi dalam sebuah negara adalah ketidaksetaraan gender.

Ketidaksetaraan gender lahir dan muncul secara alami dari kebiasaan masyarakat sejak zaman dahulu yang hingga kini menjadi sebuah struktur sosial. Hal ini mengacu pada kondisi dimana adanya keterbatasan gerak dan perlakuan tidak adil terhadap individu berdasarkan jenis kelamin mereka.<sup>1</sup> Meskipun perempuan dan laki-laki hanya berbeda secara biologis, tetapi masyarakat dunia tetap memandang hal tersebut sebagai salah satu bentuk diskriminasi sosial. Perlu diketahui, bahwa isu ketidaksetaraan gender ini mempengaruhi ketidakadilan sosial dalam berbagai aspek penting kehidupan, seperti akses terhadap pendidikan, kesempatan kerja, dan pengambilan keputusan. Seringkali implikasi dari adanya

---

<sup>1</sup> Zulfqar Ashraf Wani, "International Journal of Research Gender Inequality – A Global Issue," *International Journal of Research* (2019).

ketidaksetaraan gender ini dapat mendorong kekerasan berbasis gender yang dapat merugikan individu, masyarakat, bahkan negara secara keseluruhan. Hingga saat ini, maraknya isu kekerasan berbasis gender sudah menjadi isu global yang melekat dalam masyarakat.

Menurut berbagai penelitian dan studi sosial, India ditetapkan sebagai negara yang paling berbahaya bagi perempuan. Salah satunya adalah Thomson Reuters Foundation, sebuah perusahaan media dan informasi global yang menjunjung tinggi kesejahteraan manusia yang menunjukkan bahwa India sudah memasuki masa krisisnya sebagai negara dengan reputasi tingkat kekerasan berbasis gender tertinggi di seluruh dunia.<sup>2</sup> Hal ini utamanya dikarenakan oleh India yang dikenal masih mempopulerkan budaya fundamentalis patriarki, baik dalam masyarakatnya maupun sistem pemerintahannya.<sup>3</sup> Budaya patriarki yang dibawa oleh masyarakat menjadi sangat persuasif dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari, yang kemudian mempengaruhi tatanan sosial dan norma-norma negaranya, menjadi salah satu akar utama rentannya perempuan terhadap kekerasan berbasis gender, baik secara psikis, fisik, maupun seksual. Reputasi ini kemudian menjadi titik balik bagi aspek politik, sosial, serta hubungan internasional bagi India. Selain menghambat pembangunan manusianya, India juga dinilai sebagai negara yang gagal menganut sistem demokrasi liberal bagi masyarakatnya,

---

<sup>2</sup> Belinda Goldsmith, "Factbox: Which are the world's most dangerous countries for women?," Reuters, <https://www.reuters.com/article/us-women-dangerous-poll-factbox-idUSKBN1JM01Z/> (Accessed September 7, 2023).

<sup>3</sup> Israpil, "Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya)," *Jurnal Pusaka*, Vol. 5, No. 2 (2017).

dimana seharusnya India memberikan perlindungan dan keadilan bagi semua warganya.

Reputasi India ini diperoleh melalui beberapa isu kekerasan berbasis gender, berupa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pernikahan anak dibawah umur, *dowry death*, bahkan stereotip laki-laki India yang berkelakuan tidak pantas di sosial media maupun di kehidupan sehari-hari.<sup>4</sup> Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan di India, antara lain; Pertama, stabilitas keamanan yang kurang maksimal, seperti kurangnya jumlah petugas keamanan yang ditugaskan dalam melindungi masyarakat sipil. Kedua, nilai-nilai fundamentalis patriarki yang ditanamkan kepada masyarakat lebih menekankan pada kekuatan laki-laki dalam melakukan pekerjaan. Hal ini dikarenakan terdapat kebudayaan berupa kasta yang telah terjadi turun-temurun di India yang menyebabkan adanya ketidaksetaraan dalam hak dan kewajiban, terutama terhadap perempuan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila India menggunakan kekerasan berbasis gender, seperti tindakan kekerasan seksual atau pemerkosaan, sebagai salah satu bagian dari strategi perangnya.

Setiap negara memiliki konsep perang dan militer masing-masing. Namun, di beberapa negara, seperti di India, cenderung menggunakan pelanggaran HAM, terutama kekerasan berbasis gender sebagai strategi atau senjata dalam menyebarkan teror dan untuk menundukkan lawan perangnya. Penggunaan kekerasan seksual dalam konteks konflik militer adalah pelanggaran serius terhadap

---

<sup>4</sup> Paribhasha Sharma, "Gender-Based Crime and Gender Inequality in India: A Subnational Analysis," *Economic and Political Weekly*, Vol. 50, pp. 48-55 (2015).

hukum internasional dan Hak Asasi Manusia (HAM). Meskipun strategi ini dinilai sebagai sebuah krisis dalam militerisme, International Criminal Court (ICC) menyebut kekerasan seksual sudah menjadi bagian integral dari sebuah konflik militer, yakni sebagai strategi penghinaan bagi lawan perangnya.<sup>5</sup> Selain itu, penggunaan kekerasan seksual dalam konflik militer dapat memiliki dampak serius pada reputasi negara-negara yang terlibat dan dapat menciptakan ketidakpercayaan dan ketidakstabilan dalam hubungan diplomatik, serta merusak citra negara di mata masyarakat internasional.

Sejarah konflik Kashmir dimulai sejak masa kolonialisme Inggris atas India berakhir pada tahun 1947, Inggris membagi wilayah India menjadi dua yang kemudian pecah menjadi India, dengan mayoritas masyarakat beragama Hindu, dan Pakistan, dengan mayoritas masyarakat beragama Muslim.<sup>6</sup> Konflik sengketa Kashmir antara India dan Pakistan utamanya dipicu oleh letak geografis Kashmir yang berada di tengah-tengah kedua negara tersebut, namun, konflik ini kemudian menjadi semakin kompleks karena melibatkan kepentingan agama yang kuat di antara penduduknya dan pemberontakan dari penduduk Kashmir.

Hingga saat ini, konflik Kashmir merupakan salah satu konflik paling berkepanjangan dan kompleks di dunia, yang telah melanda wilayah Kashmir, bagian utara India dan Pakistan. Konflik sengketa Kashmir antara India dan Pakistan ini merupakan salah satu kasus terbesar di India yang membuktikan bahwa

---

<sup>5</sup> Rita Manchanda, "Review: Gendered Narrative of Kashmir," *Economic and Political Weekly*, Vol. 44, pp. 32-34 (2009).

<sup>6</sup> Rashaan Ayesh, "Timeline: The India-Pakistan Conflict Over Kashmir," *Axios*, <https://www.axios.com/2020/02/25/timeline-india-pakistan-conflict-over-kashmir> (Accessed September 7, 2023)

India termasuk dalam negara dengan intervensi Hak Asasi Manusia (HAM) terburuk pada masanya. Tentu saja, dalam memperebutkan wilayah Kashmir, masing-masing India dan Pakistan memiliki kepentingannya masing-masing. India memiliki kepentingan strategis yang kuat dalam mempertahankan wilayah Kashmir, dimana Kashmir merupakan simbolis penting dari negara sekuler India yang berusaha untuk mempertahankan keberagaman agamanya.<sup>7</sup> Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Hindu, India melihat penyatuan Kashmir sebagai bagian dari negaranya adalah upaya untuk mempertahankan prinsip sekularisme dan toleransi agama di India. Sementara itu, Pakistan memiliki kepentingan yang berbeda dalam konflik Kashmir. Pakistan sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim melihat konflik Kashmir sebagai kesempatan untuk mendukung aspirasi kemerdekaan Kashmir atau setidaknya hak otonomi yang lebih besar, karena hal ini dapat digunakan sebagai bukti bahwa negara dengan mayoritas Muslim harus memiliki identitas politik dan nasionalnya sendiri.

Salah satu pendekatan yang dilakukan India kepada Kashmir adalah mengeluarkan Artikel 370 dan Artikel 35A pada tahun 1974 dalam konstitusinya untuk mengintegrasikan Kashmir di bawah kekuasaannya, yang merupakan instrumen kebijakan domestik dari konstitusi India dalam bentuk pemberian hak atau status otonomi khusus kepada wilayah Jammu dan Kashmir. Namun, pada 5 Agustus 2019 lalu, pemerintah India di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi mengambil keputusan bersejarah dengan kembali mencabut Artikel

---

<sup>7</sup> Sumit Ganguly and Kanti Bajpai, "India and The Crisis in Kashmir," *Asian Survey*, Vol. 34, pp. 401-416 (1994).

370 dan Artikel 35A tersebut yang kemudian memicu reaksi dari dalam negeri dan internasional. Beberapa mendukungnya sebagai langkah yang diperlukan untuk mengintegrasikan wilayah tersebut dan mempromosikan pembangunan ekonomi, sementara yang lain mengkritiknya sebagai pelanggaran HAM dan menganggapnya sebagai tindakan yang merugikan hak-hak masyarakat Kashmir, dan dinilai menyalahgunakan *The Jammu and Kashmir Public Safety Act* (Act no. V of 1978: *Cognizance of offenses under this Act*). Keputusan yang diambil oleh Perdana Menteri Narendra Modi ini dikatakan sebagai keputusan bersejarah yang menuai banyak kontroversi, karena seharusnya bisa menjadi jembatan untuk meredakan konflik di Kashmir, namun justru meningkatkan ketegangan dan konflik antara India dan Pakistan.

Konflik sengketa wilayah Kashmir antara India dan Pakistan ini merupakan salah satu konflik sosial yang sensitif, melihat penggunaan senjata perang India yang melibatkan kekerasan berbasis gender, meliputi kekerasan seksual, pemerkosaan, dan pembunuhan atas warga-warga Kashmir sebagai salah satu senjata moral untuk menundukkan warga Kashmir dibawah tentara India. Sementara itu, Pakistan menentang keras kekerasan berbasis gender yang dilakukan India, sebagaimana yang dilaporkan oleh Diplomat utama Pakistan di PBB, Munir Akram, "*There is ample documented evidence that since 1989 Indian occupation forces have used rape and sexual violence as a weapon of war in occupied Kashmir*" dalam sidang PBB pasca pencabutan Artikel 370 dan Artikel 35A oleh India, karena PBB dianggap mengabaikan insiden kekerasan berbasis gender yang

terjadi di Kashmir oleh India.<sup>8</sup> Kurangnya mediator yang kuat dalam konflik ini menimbulkan dampak serius pada krisis kemanusiaan dan stabilitas di kawasan Asia Selatan.

Sejau ini, sudah ada beberapa negara dan organisasi-organisasi internasional sudah terlibat dalam upaya perdamaannya, tetapi satupun belum ada yang berhasil menemukan titik terang dalam konflik ini. Upaya pemberantasan kekerasan berbasis gender di India memang sudah meningkat beberapa tahun belakangan, sehingga tidak hanya dari pemerintah, isu mengenai kekerasan berbasis gender di India ini sudah menjadi perhatian dunia. Namun, konflik ini membutuhkan aksi kolektif yang bergerak secara internasional dan melibatkan organisasi-organisasi internasional maupun kelompok-kelompok sosial untuk turut berkontribusi menangani tingkat kekerasannya dan memberikan konsekuensi hukum dan sosial bagi India sebagai negara yang terlibat.

Alasan penulis mengambil judul **“Implikasi Kekerasan Berbasis Gender terhadap Reputasi India dalam Hubungan Internasional: Studi Kasus Konflik Kashmir”** untuk diteliti adalah berdasarkan pengalaman pribadi dan juga orang-orang sekitar penulis yang mengalami beberapa peristiwa kurang mengenakan dalam perilaku yang tercermin oleh laki-laki India di sosial media. Terlebih, penulis yakin bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini juga terjadi pada masyarakat internasional. Hal ini kemudian menanamkan persepsi bahwa India dikenal sebagai negara yang tidak memiliki kondisi sosial yang layak untuk dikunjungi perempuan.

---

<sup>8</sup> Arab News Pakistan, “Pakistan Criticized UN Report on Conflict-Related Sexual Violence for Omitting Indian and Israeli ‘Crimes’,” <https://www.arabnews.pk/node/2338311/pakistan> (Accessed October 30, 2023).

Selain itu, belum banyak diketahui bahwa konflik Kashmir berperan sebagai bukti konkret terhadap buruknya reputasi India yang melibatkan kontroversi dalam intervensi kemanusiaan, termasuk kekerasan berbasis gender sebagai strategi perang.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian yang mengacu pada implikasi kekerasan berbasis gender terhadap reputasi India dalam hubungan internasional, maka penelitian ini juga akan mengidentifikasi bagaimana implikasi ini terhadap reputasi India di masa mendatang, serta menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi tingginya angka kekerasan berbasis gender di India. Maka dari itu, pertanyaan penelitian yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Seperti apa bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh India dalam konflik Kashmir?
2. Bagaimana implikasi konflik Kashmir terhadap India dalam hubungan internasional?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat implikasi konflik Kashmir terhadap reputasi kekerasan berbasis gender India di masa mendatang. Hal ini dikaji dari kasus-kasus kekerasan berbasis gender yang terjadi dalam konflik Kashmir, serta data yang menunjukkan bahwa India merupakan negara yang berbahaya untuk perempuan. Sehingga, penulis dapat melihat faktor-faktor yang melatarbelakangi



tingginya kekerasan berbasis gender di India. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana upaya masyarakat internasional dalam berkontribusi pada resolusi konflik Kashmir.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu pembaca diharapkan dapat memperdalam pemahaman mengenai akar dari adanya isu kekerasan berbasis gender, khususnya jika melihat krisis militerisme pada konflik Kashmir untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan perhatian pembaca pada isu ketidaksetaraan gender, serta memberikan informasi mengenai konflik Kashmir antara India dan Pakistan yang belum tuntas penyelesaiannya, sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih mendorong solidaritas global dalam upaya perdamaian antara India dan Pakistan, serta mendorong kemerdekaan hak dan kebebasan Kashmir.

#### **1.5. Sistematika Penelitian**

Bab pertama pada penelitian ini membahas mengenai latar belakang terjadinya konflik sengketa Kashmir antara India dan Pakistan, dan bagaimana pengaruh reputasi budaya patriarki dan misogini di India terhadap penggunaan kekerasan berbasis gender sebagai strategi perang India dalam menundukkan wilayah Kashmir. Selain itu, bab ini juga mengandung rumusan masalah yang terdiri dari dua pertanyaan penelitian dan fokus pembahasan dari penelitian ini. Bab

ini juga dilengkapi dengan tujuan dan manfaat penelitian, serta dilengkapi dengan penjelasan singkat tentang sistematika penulisan penelitian.

Bab kedua dari penelitian ini terdiri dari dua bagian, yaitu tinjauan pustaka dan kerangka teori dan konsep. Tinjauan pustaka terdiri dari beberapa sumber literatur dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dan memiliki kredibilitas terkait topik yang ingin diteliti untuk membantu memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai topik penelitian ini, yang akan terbagi menjadi beberapa kategori utama. Selain itu, kerangka teori dan konsep berisikan teori Liberalisme dan delapan konsep utama yang digunakan sebagai perspektif yang akan digunakan dalam membantu penelitian ini.

Bab ketiga membahas mengenai metodologi penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini, di mana bab ini akan merangkum pendekatan penelitian, metode penelitian, proses pengumpulan data, serta proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab keempat merupakan bagian utama dari penelitian ini yang membahas secara rinci dan mendalam hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis. Bagian ini menjelaskan mengenai bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender yang terjadi dalam konflik Kashmir, dan implikasinya terhadap reputasi India dalam hubungan internasional.

Bab kelima dari penelitian ini merupakan rangkuman dan kesimpulan yang meringkas seluruh pembahasan dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari dua bagian, yaitu kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Kesimpulan berisi ringkasan seluruh jawaban dari setiap penelitian yang disampaikan pada

bagian-bagian sebelumnya. Selain itu, saran berisi masukan dan rekomendasi yang penulis dapat sampaikan terhadap berbagai aspek dari penelitian ini, seperti saran terhadap kebijakan India dan aksi kolektif yang perlu diupayakan dalam proses penyelesaian konflik Kashmir.

